

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

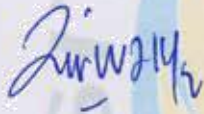
**PENANGANAN SENGKETA TANAH MELALUI JALUR MEDIASI
OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
DI KOTA GORONTALO**

Oleh:
SITI HARTINA M. MARTANI
NIM : 271414120

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I

Pembimbing II



Hj. Nirwan Junus, SH., MH
NIP. 19690602 200003 2 001



Abdul Hamid Tome SH., MH
NIP. 19840501201504 1 002

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo



Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PENANGANAN SENGKETA TANAH MELALUI JALUR MEDIASI

OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

DI KOTA GORONTALO

Oleh:

SITI HARTINA M. MARTANI

NIM : 271414120

Telah diperiksa dan disetujui

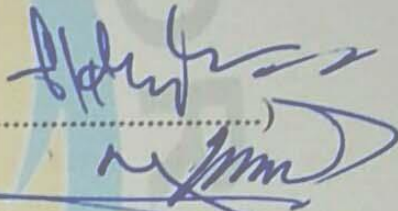
DEWAN PENGUJI

Hari/Tanggal : Senin, 02 Juli 2018

Pukul : 08.00 – 09.00 WITA

1. **Hj. Mutia Ch. Thalib, SH.,M.Hum**

NIP. 19699794 199802 2 001

(.....)


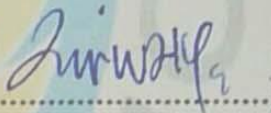
2. **Suwitno Yutye Imran, SH.,MH**

NIP. 19830622 200912 1 004

(.....)

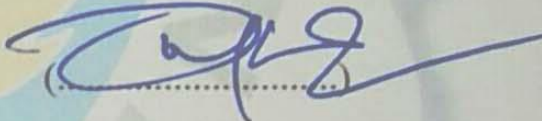
3. **Hj. Nirwan Junus, SH.,MH**

NIP. 19690602 200003 2 001

(.....)


4. **Abdul Hamid Tome, SH.,MH**

NIP. 19840501201504 1 002

(.....)


Gorontalo, 02 Juli 2018

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum

NIP. 19701105 199703 1 001

ABSTRAK

SITI HARTINA M. MARTANI, NIM 271414120, dengan judul skripsi “PENANGANAN SENGKETA TANAH MELALUI JALUR MEDIASI OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA GORONTALO”. Dibawah bimbingan Ibu Hj. Nirwan Junus, SH., MH sebagai pembimbing I dan Bapak Abdul Hamid Tome, SH., MH sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan sengketa tanah melalui jalur mediasi oleh BPN Kota Gorontalo dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penanganan sengketa tanah melalui jalur mediasi oleh BPN Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yuridis sosiologis adalah metode penelitian hukum yang menggunakan data primer. Data primer adalah merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dan lokasi penelitian guna mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai isi objek yang diteliti.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penanganan sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Gorontalo. BPN juga dapat menjadi mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun BPN sebagai mediator tidak dapat menentukan hasil kesepakatan melainkan kedua belah pihak sendiri yang harus membuat kesepakatannya. Apabila cara mediasi berhasil dicapai kesepakatan akan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Faktor yang menjadi kendala bagi BPN dalam penanganan sengketa tanah melalui jalur mediasi adalah para pihak yang masih emosi, kuasa hukum yang menghambat proses mediasi karena ada beberapa kuasa hukum yang lebih memilih memenangkan perkara dipengadilan, ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi sengketa tanah juga dapat menjadi penghambat proses mediasi sehingga penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi menjadi tidak efektif.

Kata Kunci : Penanganan, Sengketa Tanah, Mediasi, BPN

ABSTRACT

Martani, Siti Hartina M. Student ID: 271414120. "Settlement of Land Dispute through Mediation by State Regional Land Agency Gorontalo City". Principal Supervisor: Hj. Nirwan Junus, SH., MH. Co-supervisor: Abdul Hamid Tome, SH., MH.

This study aims to identify the settlement of land dispute through mediation by State Regional Land Agency Gorontalo City; and factors obstructing the dispute settlement. The research employed sociological juridical method, i.e. a method in law studies which involves primary data. The primary data were obtained from the research site in order to have comprehensive explanation of the researched objects.

The result shows that the State Regional Land Agency is able to resolve land disputes by mechanism of mediation. In this case, the agency acts as mediator to assist the parties involving to provide an ease of information exchange and to encourage discussions about conflicting interests, perceptions, and interpretations of the case and its context in accordance with regulations applied. However, the agency has been incapable of deciding the agreement result; the involving parties need to make the agreement by themselves. If the mediation succeeds, the agreement result will be inputted in the report signed by the involving parties and mediator.

Moreover, there are factors that obstruct the agency to settle the land dispute by mediation effectively, i.e. unsatisfied parties, lawyer that chooses to proceed to the court rather than resolving the case by help of the mediator, and absence of involving parties in mediation process.

Keywords: Settlement, Land Dispute, Mediation, State Regional Land Agency

